

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2020)**



SKRIPSI

Digunakan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Program Studi Strata 1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Nur Fitriana

18210055

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2020)**



SKRIPSI

Digunakan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Program Studi Strata 1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Nur Fitriana

18210055

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Fitirana
NIM : 18210055
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi (Studi Pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-
2020).

Disetujui dan disahkan:

Hari : Senin
Tanggal : 23/5 2022

Pembimbing,



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

Mengetahui,
Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

NIDN: 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Fitriana
NIM : 18210055
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : **PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Pada Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2020).**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana
Akuntansi.

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Pardi S.E., M.M., M.H.

Anggota : Ismunawan S.E., M.Si

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI (STUDI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2020).**

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, Mei 2022

Yang memberi Pernyataan



Nur Fitriana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”

(HR Muslim)

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking, Don’t settle.”

(Steve Jobs)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Bapak, Ibu tercinta dan adik tersayang selaku keluarga saya yang selalu memberikan do’a, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun material. Sahabat dan teman tercinta telah memberikan semangat serta bantuan yang tak ternilai besarnya.

Terimakasih

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: “ **Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020)**. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan sebagian persyaratan kelulusan Sarjana Program Studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan Skripsi ini, saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Pardi S.E.,M.M.,M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E.,M.Acc selaku Kaprodi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Dr.Pardi S.E.,M.M.,M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan,ilmu, pengarahan dan saran dalam penyusunan skripsi.
4. Segenap Bapak, Ibu dosen dan staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
5. Orang tua dan Saudara yang telah memberikan doa serta dukungan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan kelas S1 Akuntansi B/R1 yang telah membantu dalam segala hal hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Dalam Penyelesaian Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan Untuk ini mohon kritik dan saran yang membangun sebagai pembelajaran bagi saya kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi saya pribadi. Terimakasih.

Sukoharjo, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Teori Yang Relevan.....	11
1. Teori Fiskal Federalism.....	11
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	13
3. Pendapatan Asli Daerah	14
4. Dana Alokasi Umum.....	20
5. Dana Alokasi Khusus.....	21
6. Dana Bagi Hasil	22
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis	31

BAB III.....	36
METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Objek Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Definisi Oprasional.....	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	44
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Identitas Responden	44
B. Analisis Data.....	45
1. Uji Asumsi Klasik.....	45
2. Analisis Regresi Linear Berganda	49
3. Uji Parsial T.....	50
4. Uji Signifikan Simultan	53
5. Uji Statistik R	54
C. Pembahasan	54
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Tahun (2016 – 2020)	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 <i>Output</i> Hasil Uji Normalitas	45
Tabel 4.2 <i>Output</i> Hasil Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.3 <i>Output</i> Hasil Uji Heteroskedasitas	47
Tabel 4.4 <i>Output</i> Hasil Uji Autokorelasi	48
Tabel 4.5 <i>Output</i> Hasil Uji Linear Berganda	49
Tabel 4.6 <i>Output</i> Hasil Uji Pengaruh Parsial	50
Tabel 4.7 <i>Output</i> Hasil Uji Pengaruh Simultan	53
Tabel 4.8 <i>Output</i> Hasil Uji Koefisien Determinasi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik PDRB Jawa Tengah.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Uji Normalitas	64
Lampiran 2. Hasil Uji Multikolinieritas	64
Lampiran 3. Hasil Uji Heteroskedasitas	65
Lampiran 4. Hasil Uji Autokorelasi.....	65
Lampiran 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	66
Lampiran 6. Hasil Uji Simultan F.....	66
Lampiran 7. Hasil Uji Parsial T	66
Lampiran 8. Pendapatan Provinsi Jawa Tengah.....	67

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI (STUDI PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-
2020).**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020). Populasi penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan data time series bps Jawa Tengah 2016-2020, sampel yang diperoleh adalah sebanyak 5 Kota/Kabupaten Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji analisis regresi berganda dengan menggunakan alat bantu aplikasi IBM SPSS Statistic 16.0.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana bagi hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Secara simultan (bersama-sama) PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016- 2020.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK), Dana bagi hasil (DBH), Pertumbuhan Ekonomi

**PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI (STUDI PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2020).**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of regional income on economic growth (study in Central Java province in 2016-2020). The population of this research is Central Java Province. Sampling was carried out using Central Java bps time series data 2016-2020, the samples obtained were 5 cities/districts of Central Java. The research method used in this research is classical assumption test and multiple regression analysis test using the IBM SPSS Statistic 16.0 application tool.

The results obtained in this study indicate that partially there is a significant effect between general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK) on economic growth and there is no significant effect between local revenue (PAD) and profit sharing funds (DBH).) to Central Java's Economic Growth in 2016-2020. Simultaneously (together) PAD, DAU, DAK and DBH have a significant effect on Economic Growth in 2016-2020.

Key words : Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), Economic Growth.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Besar kecilnya pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu sendiri dalam beberapa waktu tertentu. Di era otonomi daerah maka sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, DBH, DAU, dan DAK. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin baik sebab mempengaruhi secara positif pembiayaan pembangunan ekonomi di daerah, dalam arti bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan ekonomi juga akan semakin besar sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Kondisi seperti ini juga diharapkan dapat terjadi di Provinsi Jawa Tengah dimana peranan PAD, DBH, DAU dan DAK diharapkan akan memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Fenomena Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah pada kondisi normal sebelum pandemi covid-19 selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil pada kisaran 5,2 - 5,4 persen, bahkan selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi

nasional. Pada angka pertumbuhan, terlihat tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Secara umum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didukung dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha. Namun, jika dibandingkan dengan lima Provinsi di Pulau Jawa, dari sisi besaran kontribusi bagi perekonomian nasional, Jawa Tengah masih di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Angka kontribusi Jawa Tengah berada di bawah 10 persen terhadap perekonomian nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga lebih rendah dibandingkan laju perekonomian kawasan Jawa. Hal ini menjadi tantangan bagi Jawa Tengah untuk dapat tumbuh lebih tinggi lagi, mengingat secara geografis, Jawa Tengah berada diantara Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam peranannya menghubungkan kedua wilayah tersebut.

Perekonomian Jawa Tengah juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Investasi mengalami penurunan sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan ekspor-impor terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan di Jawa Tengah juga menurun, seiring dengan meningkatnya Non Performing Loan (NPL).

Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan di Jawa Tengah. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu zona merah Covid-19.

Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian (Prawira, 2018:3).

PDRB perkapita Jawa Tengah dari tahun 2014 s.d. 2019 menunjukkan kenaikan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita akibat adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang mencapai Rp56,90 juta, posisi PDRB per kapita Jawa Tengah masih rendah dengan gap yang cukup jauh dan cenderung konstan. Laju pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita

Jawa Tengah dari angka rata-rata nasional. Selama periode 2014 s.d. 2020, PDRB perkapita mengalami penurunan meskipun pada tahun 2018 mulai meningkat lagi namun tahun 2019 kembali turun dan pada tahun 2020 tumbuh sebesar -1,63 persen.



Gambar 1.1 Grafik PDRB Jawa Tengah

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi

Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, DBH, DAU, DAK dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan lain yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri”. Pendapatan asli daerah terbagi menjadi beberapa bagian yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah dihimbaungkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah agar pemerintah bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah mengalokasikan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), agar mendanai kebutuhan daerah dan melaksanakan desentralisasinya (Azhari, 2019:3).

Undang-undang No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah dalam pengelolaan daerahnya dibantu oleh pemerintah pusat yaitu dengan adanya pemberian dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selain Dana perimbangan pemerintah daerah juga mendapat dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat menggunakannya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APPBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah (Dwi Anggoro 2017:24).

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, Dana Alokasi Umum adalah pendapatan transfer pemerintah daerah dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar-Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat block grant, maksudnya adalah pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi anggaran dari APBN kepada daerah yang telah ditentukan untuk membantu pendanaan kegiatan daerah yang bersifat khusus dan sejalan dengan prioritas nasional. DAK secara khusus membantu mendanai sarana dan prasarana daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain dalam (Ndede, Sondakh, & Pontoh, 2016).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah alokasi dana dari APBN untuk daerah otonom yang ditentukan berdasarkan persentase dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Bagi Hasil berfungsi agar tidak terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan memberikan perhatian terhadap daerah penghasil. DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah menurut Listiornini dalam (Susanti & Fahlevi, 2016).

Tabel 1.1. Variabel Bebas dan Terikat Kabupaten di Jawa Tengah

Tahun	PAD Kota Madya	DAU Kota Madya	DAK Kota Madya	DBH Kota Madya	Pertumbuhan Ekonomi
2016	1.899.207.091	5.434.119.045	1.341.789.352	252.007.825	244,77

2017	2.247.891.140	5.284.659.048	1.503.050.946	225.186.311	257,24
2018	2.050.985.535	4.726.707.115	1.412.165.194	183.897.517	207,01
2019	2.262.048.728	4.978.643.900	1.388.539.362	137.647.035	312,81
2020	2.183.652.279	4.945.502.501	1.431.014.687	180.367.437	307,06

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2016-2020

Pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa pendapatan asli daerah terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp196.905.605, pada tahun 2019 sebesar Rp211.063.1933 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp78.369.449. Jumlah dana alokasi umum terus mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp251.936.785 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar Rp33.141.399. Jumlah dana alokasi khusus pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp161.261.594 namun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp42.475.325. Jumlah dana bagi hasil pada tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan namun pada tahun 2020 dana bagi hasil mengalami kenaikan sebesar Rp42.720.402. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2020 pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mengalami penurunan dan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pada tahun terakhir mengalami kenaikan pendapatan. Pada tabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 207,81, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 312,81 dan pada tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 307,06 pada PDRB.

Berdasarkan fenomena masalah diatas penting untuk diteliti pada pertumbuhan ekonomi di sektor pendapatan daerah oleh sebab itu penelitian ini di beri judul “ PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (STUDI PADA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2020) “.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah.
4. Untuk dapat mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris yang nantinya digunakan sebagai bahan perbandingan bagi pemerintah dalam mengetahui pendapatan daerah apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sampai 2020.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di mana dengan tema atau topik penelitian yang sama dan juga bidang yang sama.

c. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Fiscal Federalism

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan Teori Fiscal Federalism sebagai dasar teori utama. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori ini terdapat perbedaan antara kepentingan agen dan prinsipal, sehingga pihak agen mungkin saja melakukan tindakan tidak baik kepada kepentingan pihak prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggung jawaban atas pengambilan keputusannya kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab tersebut diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Teori keagenan telah dipraktikan di organisasi publik khususnya di pemerintahan daerah. Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Semestinya pemerintah daerah sebagai pihak agen bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat).

Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, terkadang pemerintah (agen) berperilaku oportunis dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan bahwa antara

agen dan prinsipalnya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang di proksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sehingga sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun member pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbale balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Teori Fiscal Federalism menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. *Teori Fiscal Federalism* adalah teori yang dikembangkan oleh Hayek (1945), Musgrave (1959) dan Oates (1972).

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi ekonomi pertumbuhan (Bodman et al. 2009). Fungsi utama dari desentralisasi fiskal yaitu Pengaruh meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Faridi, 2011).

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah faktor penting yang mendukung keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dari perkembangan produksi barang dan jasa dalam suatu negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar

dari pada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari aspek dinamis melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui penambahan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu

daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017:23).

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Siahaan dalam (Sabil, (2017))

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari :

1). Jenis Pajak propinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok

2). Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Windhu (2018: 185).Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Yoyo2017:108).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusiadalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi mempunyai 3 bagian yaitu:

1). Retribusi Jasa Umum

Merupakan jasa yang diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan bersama maupun pribadi yang dapat dirasakan dan dinikmati.

2). Retribusi Jasa Usaha

Merupakan jasa yang diberikan dari pemerintah daerah yang menggunakan prinsip komersial yang diberikan dari sektor swasta.

3). Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan suatu kegiatan pemerintah daerah atas pemberian izin untuk orang pribadi dan badan guna pembinaan, pengendalian maupun pengawasan dari kegiatan. Atas pemanfaatan ruang, fasilitas tersebut dan berguna untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar daerah tersebut tanpa harus merusaknya.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan

dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah antara lain : laba atas penyertaan modal pada BUMD, laba atas penyertaan modal pada BUMD dan laba atas penyertaan modal pada perusahaan patungan/milik swasta.

Macam-macam pendapatan terdiri dari beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1). Laba atas modal perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah tersebut.
- 2). Laba terdiri dari penyertaan modal perusahaan milik Negara dan badan usaha milik Negara (BUMN) tersebut.
- 3). Laba dari penyertaan modal perusahaan milik swasta daerah tersebut.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Prawira (2018)).

Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun beberapa macam pendapatan yang meliputi objek pendapatan yaitu :

- 1). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2). Jasa giro
- 3). Pendapatan bunga
- 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5). Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah tersebut.

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda bphtb, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan hasil pengelolaan dana bergulir

Agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah. Semua Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mekanismenya harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan aturan yang ditetapkan tidak dibenarkan melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dan revisinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Perlu dijelaskan, khususnya untuk sektor perikanan, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan untuk PAD pada jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan syarat fasilitasnya sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dari Dana Bagi Hasil Perikanan dari Pemerintah Pusat seluruh Kabupaten/Kota hanya memperoleh alokasi bagi rata yang sama.

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Nordriawan 2017:87).

Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- 1). Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
- 2). Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

5. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain:

kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain dalam (Ndede, Sondakh, & Pontoh, 2016).

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Anggraeni dan suhardjo , 2010).

6. Dana Bagi Hasil

DBH (Dana Bagi Hasil) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Susanti & Fahlevi, 2016).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1.	Ni Wayan Ratna Dewi I Dewa Gede Dharma Suputra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal (X3)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Regresi Linear Berganda	Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Meylani M. Arina, Rosalina A.M Koleanan, Daisy S.M. Engka (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Analisis Regresi Berganda	Bahwa secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertanda negatif dan tidak berpengaruh

						signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado bertanda positif dan berpengaruh signifikan. Dan untuk pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perekonomian Kota Manado.
3.	Lio Satria Putra Perkasa, George M. V. Kawung, Steeva Steeva Y. L.	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pertumbuhan	Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Uji asumsi klasik dan regresi linear berganda.	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum

	Tumangkeng (2021)	Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara				Berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. sedangkan Variabel Dana Alokasi Khusus, Positif tapi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan pada penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4.	Awal Nopriyanto Bahasoan , Aswar Rahmat & Andini Nurhajra (2020)	Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2018	Dana Alokasi Umum (X1), Belanja Modal (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Regresi data Panel	Hasil penelitian ini adalah belanja modal dan dana alokasi umum (DAU) di Provinsi Sulawesi Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Muhammad Ridwan Manulusi, Bahar Sinring, A.M. Hasbi (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) Dan Dana	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Statistik deskriptif dan regresi data panel	Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan

		Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Alokasi Khusus (X3)			signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6.	Murti Fadillah (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah (X1) Dan Dana Alokasi Umum (X20)	Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Dan Belanja Modal (Y2)		Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0, maka pendapatan asli daerah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dana alokasi umum berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dan berdasarkan penelitian analisis jalur, maka hasil dari pengolahan data bahwa nilai

						pendapatan asli daerah berpengaruh langsung lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak melalui belanja modal. Sedangkan untuk nilai dana alokasi umum berpengaruh langsung lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak melalui belanja modalnya yang sebagai variabel interveningnya.
7.	Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan (2018)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3)	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan

						ekonomi.
8.	Christofel Alvonsus Supit Watulingas, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara	Pendapatan Asli Daerah (X1),	Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara. Pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
9.	Evi Sulastri, Efendri (2020)	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) (Kabupaten atau kota di seluruh provinsi di kaimantan tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana bagi hasil (X4)	Indeks pembangunan manusia (Y)	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

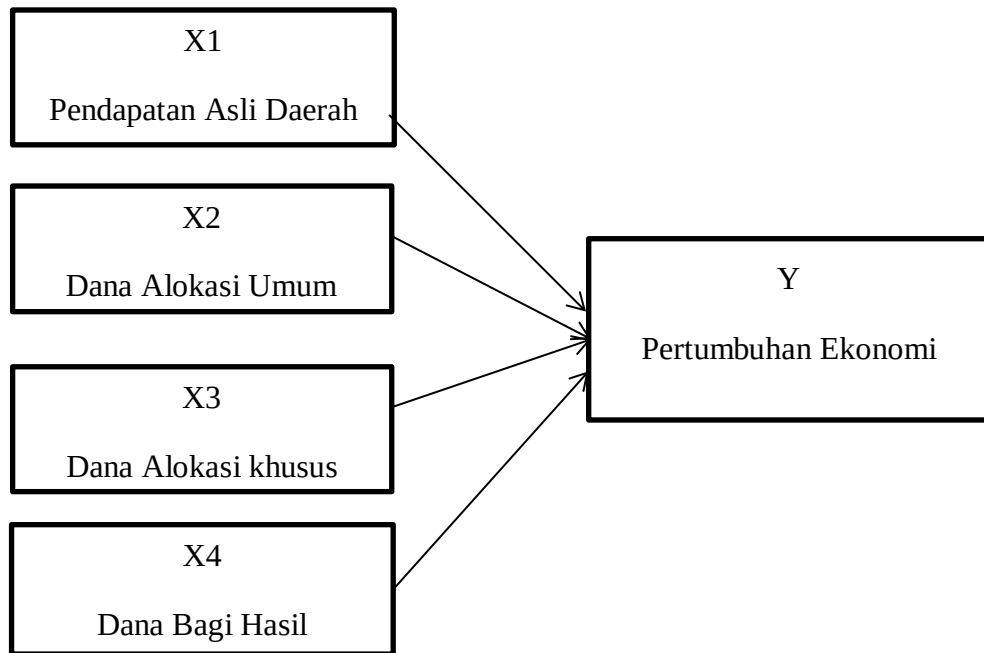
		anggaran 2015-2019)				(IPM), 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 4) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 5) PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap IPM.
10	Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah serbagita provinsi bali	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana bagi hasil (X4)	Pertumbuhan ekonomi (Y)	Analisis diskriptif dan Analisis linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Serbagita Provinsi Bali.

						Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali
--	--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini dibuat satu kerangka pemikiran yang dapat menjadi landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat diketahui variabel mana yang paling dominan variabel mana yang paling dominan mempengaruhi Belanja Daerah. Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel dependen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Bagi Hasil (X4) sebagai variabel independen.

Penelitian ini mencoba menganalisis seberapa besar faktor-faktor (X) tersebut mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan pernyataan diatas, tinjauan landasan teori, dan penelitian terdahulu maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya melalui pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dakam masyarakat.

Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan sejumlah output barang dan jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah. Dewi (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Prantini (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut

H1: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (horizontal imbalance) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat Menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula.

Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan

bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah.(Sidik, 2003:25). Manulusi (2021) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas hipotesis, penelitian yang dihasilkan sebagai berikut.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah melalui penggunaa Dana Alokasi Khusus. DAK adalah salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju Pertumbuhan Ekonomi antar daerah dan pelayanan antar bidang.DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi

penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Pengalokasian DAK kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian dan percepatan pembangunan yang kemudian meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah (Sutedi Adrian, 2012:143). Talangamin (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DBH dialokasikan kepada daerah akibat dari adanya desentralisasi yang kemudian besaran pengalokasian ditetapkan berdasarkan angka presentase dan berasal dari APBD (pasal 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah yang mempunyai tujuan dalam memperbaiki kecacatan fiskal vertikal yang berfungsi sebagai alat dalam meningkatkan belanja daerah untuk membiayai kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional (Wiliantara & Budiasih, 2016).

DBH merupakan pendapatan yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. DBH merupakan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membangun kembali suatu daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tiap daerah. Kusumawati (2018) menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas hipotesis penelitian yang dihasilkan sebagai berikut

H4: Dana Bagi Hasil tidak Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam analisis data dapat dikembangkan menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4. Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

B. Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan hasil penelitian tersebut. Adapun beberapa saran dari penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa menjadi daerah yang mandiri dan secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat.

- a. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum (DAU) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa bertambah.
- c. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Khusus (DAK) agar Pertumbuhan Ekonomi setiap periodenya bisa digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
- d. Bagi peneliti selanjutnya agar mengambil populasi selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan menambah variabel penelitian yang lebih lengkap dan bervariasi. Penambahan variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awal Nopriyanto Bahasoan , Aswar Rahmat & Andini Nurhajra ,(2020).Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2015-2018
- Badan Pusat Statistik (t.t). Diambil pada 20 oktober 2021, dari BPS :
<https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/08/2181/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-menurut-jenis-pendapatan-juta-rupiah-2016-2020.html>
- Christofel Alvonsus Supit Watulingas, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka Pengaruh Pendap atan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara
- Evi Sulastri, Efendri, (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) (Kabupaten atau kota di seluruh provinsi di kaimantan tahun anggaran 2015-2019)
- Lily Kusumawati, I Gusti Bagus Wiksuana, (2018) . Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah serbagita provinsi bali
- Lio Satria Putra Perkasa, George M. V. Kawung, Steeva Steeva Y. L. Tumangkeng (2021) Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawes Utara
- Meylani M. Arina, Rosalina A.M Koleangan, Daisy S.M. Engka (2019)PengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado
- Muhammad Ridwan Manulusi, Bahar Sinring, A.M. Hasbi, (2021) .Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan
- Murti Fadillah, (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Utara
- Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nurtantiono, A (2021). Analisis regresi kasus dan analisis dengan spss. Surakarta : STIE Surakarta

Olvy Beatriks Talangamin, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan, (2018) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

<https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah/>